

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah menitikberatkan pada daerah kabupaten atau kota dengan menyerahkan beberapa kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.¹ Otonomi daerah dalam upaya mencapai tujuan negaranya yaitu dengan menempatkan Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai institusi yang mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan salah satu instrument yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan yaitu manajemen belanja daerah yang tercermin dalam APBD.² Permasalahan yang sering terjadi dalam Pemerintah Daerah yaitu ketika dihadapkan untuk menanggung kebutuhan daerah yang besar akan tetapi jumlah pendapatan

¹ Juwari, Djoko Setyadi dan Yana Ulfah, “Pengaruh Pajak Dan Retribusi Serta DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Kalimantan”, dalam *Jurnal GeoEkonomi*, Vol. 07, No. 01 (Maret, 2016), h. 2.

² Bagus Bowo Laksono, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah”, dalam *Accounting Annalysis Journal*, No. 3 (April, 2014), h. 458.

daerah yang kecil, dan juga pada saat yang bersamaan kurangnya kreativitas Pemerintah Daerah dalam mengelola APBD sehingga kurang optimal dalam pengelolaannya.³

Pemerintah daerah melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dengan cara memberikan perbandingan alokasi belanja daerah yang lebih tinggi kepada sektor yang dianggap produktif.⁴ Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pula bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan adalah bagian dari APBD.

³ Juwari, Djoko Setyadi dan Yana Ulfah, “Pengaruh Pajak Dan Retribusi Serta DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Kalimantan”, h. 2.

⁴ Fajar Nugroho, “Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah”, dalam *Dionegoro Journal of Accounting*, Vol. 1, No. 1 (Oktober, 2012), h. 48.

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan digunakan untuk memenuhi belanja daerah. Belanja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan kelompok belanja pemerintah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam pasal 50 Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.⁵

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.⁶ Pemerintah daerah harus mampu untuk dapat mengalokasikan belanja modal dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang memadai untuk publik. Alokasi belanja modal harus didasarkan atas kebutuhan daerah

⁵ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Belanja Daerah", <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada 07 Februari 2021 pukul 20:10.

⁶ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Belanja Daerah", <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/> diakses pada 07 Februari 2021 pukul 20:20.

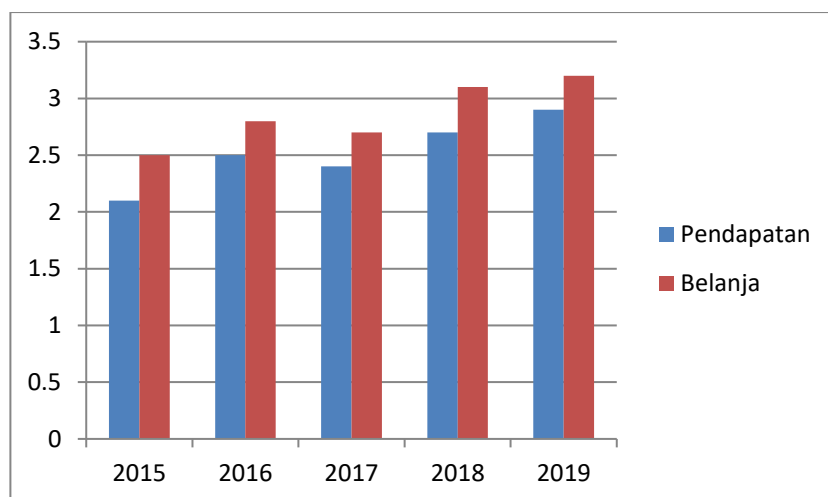
sehingga sarana dan prasarana yang diciptakan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kelancaran pelaksanaan pemerintah maupun untuk fasilitas publik.⁷ Dalam meningkatkan pengalokasian belanja modal, ada beberapa variabel yang harus diketahui yang dapat mempengaruhi belanja modal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, yang termasuk bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Khusus yang termasuk bagian dari Dana Perimbangan.

Dalam pengelolaan belanja di Pemerintah Kabupaten Serang kurang optimal karena belanja lebih besar dibanding pendapatan. Berdasarkan Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2017 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa APBD tahun anggaran 2018 yaitu pendapatan sebesar Rp. 2,7 Triliun sedangkan belanja sebesar Rp. 3,1 Triliun, oleh karena itu pemerintah mengalami defisit dalam anggaran sebesar 3,5 Milyar. Sehingga pengalokasian belanja dan pengelolaan

⁷ Yunistin Ndede, Jullie, Sondakh, Winston Pontoh, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kota Manado", dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 03, 2016, h. 587.

keuangan yang kreatif sangat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya anggaran defisit, dan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dapat dilakukan secara optimal.

Berikut ini grafik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang pada tahun 2015-2019.



Dalam Triliun Rupiah

Sumber: APBD Kabupaten Serang

Pajak daerah merupakan pendapatan asli daerah yang terbesar dibandingkan retribusi daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib atas orang pribadi atau badan/lembaga yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk memenuhi

pembiayaan belanja modal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah.⁸ Penetapan pajak dalam tiap daerah berbeda-beda. Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan/lembaga ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan besarnya pendapatan/bangunan/sumber daya yang digunakan dan sebagainya, yang tercantum dalam Undang-undang tentang wajib pajak.

Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah terbesar kedua setelah pajak daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 34 Tahun 2000 retribusi daerah adalah pungutan daerah yang ditetapkan sebagai pembayaran pemberian izin atau pembayaran atas jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi

⁸ Ramlan, Darwanis, Syukriy Abdullah., “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)”, dalam *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 5 No. 2 (Mei, 2016), h. 81.

atau badan.⁹ Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam sektor retribusi daerah dapat menjadikan bahwa daerah mengalami kemandirian, sehingga dalam pengalokasian belanja modal dapat meningkatkan pelayanan yang akan tersedia untuk masyarakat.¹⁰

Dana alokasi khusus adalah bagian dari dana perimbangan yang digunakan untuk pembiayaan khusus penyelenggaraan pemerintah. Penggunaan Dana Alokasi Khusus lebih diarahkan untuk menunjang sarana dan prasarana fisik yang dapat digunakan untuk jangka panjang sebagai investasi dalam pembangunan.¹¹ Pembangunan yang dilakukan adalah untuk mendorong percepatan pembangunan sehingga mencapai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

⁹ I Komang Sudika dan I Ketut Budiarta, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali”, dalam *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 21.2 (November, 2017), h. 1693.

¹⁰ Ramlan, Darwanis, Syukriy Abdullah., “ Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh), h. 81.

¹¹ I Komang Sudika dan I Ketut Budiarta, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal Provinsi Bali”, h. 1694.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul **“Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten Serang tahun 2015-2019”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kreativitas dalam pengelolaan APBD sehingga belum maksimal dalam menanggung kebutuhan daerah yang besar tetap pendapatan yang kecil.
2. Pemanfaatan pendapatan daerah kurang difokuskan untuk kepentingan umum sebagaimana yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah.
3. Alokasi belanja yang dilakukan belum tepat dengan kebutuhan daerah.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dilakukan agar penelitian ini menjadi lebih terarah, terfokus dan tidak menyinggung dari sasaran pokok penelitian. Penelitian ini di batasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah yang diteliti adalah pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Serang dalam Periode 2015-2019.
2. Selama periode penelitian pendapatan daerah tetap tercantum dalam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten Serang tahun 2015-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten Serang tahun 2015-2019 ?

3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten Serang tahun 2015-2019 ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten Serang tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten Serang tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal di Kabupaten Serang tahun 2015-2019.

F. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi alokasi belanja modal di Kabupaten Serang.

2. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan membantu pemerintah di Kabupaten Serang dalam hal menentukan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja BUMD agar dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal. Selain itu penelitian ini juga memberikan kontribusi keilmuan kepada lembaga pendidikan.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN TEORETIS

Bab ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori ini yang akan digunakan sebagai landasan pendukung mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis. Dalam kajian teoretis ini berisi deskripsi teori, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, hubungan antar variabel dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data beserta sumber data yang digunakan.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang didapat berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis data.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang diperoleh.